

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
GIRISA KECAMATAN PAGUYAMAN
KABUPATEN BOALEMO**

OLEH

DESI SUMANTI DATE

NIM: S2116005

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Sosila Dan Ilmu Politik

Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2019/2020**

LEMBAR PENGESAHAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA GIRISA KECAMATAN
PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO**

DESI SUMANTI DATE

NIM : S. 21.16.005

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Universitas Ichsan Gorontalo
2020

PEMBIMBING I



Darmawanty Abd. Razak., S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

PEMBIMBING II



Sandi Prahara., S.T., M.Si
NIDN: 0929038602

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Darmawanty Abd. Razak., S.IP., M.AP
NIDN: 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
GIRISA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN
BOALEMO**

Oleh :
DESI SUMANTI DATE
NIM : S2116005

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr. Arman, S.Sos., M.Si
2. Marten Nusi, S.IP., M.AP
3. Achmad Ryza Mediansyah, S.Sos., M. Si
4. Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.AP
5. Sandi Prahara, S.T., M.Si

.....

.....

.....

.....

.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan



Dr. Arman, S.Sos., M.Si
NIDN : 091308602



Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP
NIDN : 0924076701

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DESI SUMANTI DATE

NIM : S2116005

Konsentrasi : MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat pendapat atau karya yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabtan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, Juni 2020



DESI SUMANTI DATE
S2116005

MOTO DAN PERSEMBAH

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(QS 94: 6-7)

“Cerdas dalam berfikir, cermat dalam bertindak”

Aku persembahkan karya ilmiah ini sebagai tanda bukti cinta kepada Alm.Ayah dan Almh.Ibunda tercinta, **Agus Date** dan **Darmon Karim**, yang telah melahirkan, merawat dan membimbing sampai akhir hayat mereka. Kepada om dan tante yang menjadi pengganti posisi orangtua merawat dan membantuku, ketulusan mereka dari hati yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai. Serta untuk orang-orang terdekatku yang tersayang yang sampai saat ini selalu memberi dukungan yang begitu tulus.

ALMAMATER TERCINTA

TEMPAT AKU BELAJAR DAN MENIMBAH ILMU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO.

ABSTRAK

Desi Sumanti Date. S2116005, Dengan program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo 2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, menyusun penelitian dengan judul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo” dan di bimbing oleh Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP, M.AP dan Ibu Sandi Prahara S.T, M.SI selaku pembimbing kedua.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa girisa kecamatan paguyaman kabupaten boalemo merupakan tujuan utama penelitian ini dilakukan, dengan melihat factor penghambat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Tujuan tersebut nantinya akan digunakan melalui penelitian kualitatif yang menguraikan data deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan selama hampir dua bulan yang dilakukan di Desa Girisa Kecamatan paguyaman Kabupaten Boalemo ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur cukup terlihat baik, walaupun beberapa warga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi sama sekali karena alasan yang berbeda-beda tentunya, tapi masih banyak juga yang mengerti akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur karena masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran. Walaupun Terdapat beberapa hal yang menghambat masyarakat dalam berpartisipasi, diantaranya adanya sosialisasi, waktu dan kesempatan.

Kata Kunci : Partisipasi, pembangunan Infrastruktur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya ProposalSkripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Girisan Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo”, bisa terselesaikan dengan baik. PenyusunanSkripsi ini sebagai persyaratan mengikuti ujian akhir studi Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Icshan Gorontalo. Dan semoga atas izin-Nya pulal Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kepada Masyarakat Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo khususnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik ini maupun sistematika penyusunannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun senantiasa peneliti harapkan untuk penyempurnaan penyusunan Skripsi ini.

Peneliti ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada **Ibu Darmawaty Abdul Razak, S.IP., M.AP** selaku Pembimbing I dan **Ibu Sandi Prahara, S.T., M,Si** selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dalam kesempatan

untuk selalumemberikan arahan dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi peneliti, dalam penyusunan skripsi ini. Dan telah sabar dalam membimbing bagi peneliti Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Muhammad Ichsan, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Univrsitas Ichsan Gorontalo.
2. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo Bpk Dr.Abdul Gaffar La Tjokke M.Si
3. Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Bpk Dr.Arman.S.Sos.,M.Si Universitas Ichsan Gorontalo, serta Wakil Dekan I, II, dan III.
4. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Ibu Darmawaty Abd. Razak, S.IP., M.APUniversitas Ichsan Gorontalo
5. Para Dosen serta para Staf Administrasi di lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo.
6. ayahanda tercinta Agus Date (Alm) dan Ibunda tercinta Darmon Karim (Almh) yang semasa hidupnya sangat besar jasanya dalam mengasuh, mendidik, membimbing, membiayai memberi semangat, memotivasi, sekaligus selalu berdo'a dan berharap kepada Allah swt, agar senantiasa Anak-anaknya diberikan kesehatan, kekuatan, dan sukses dalam menyelesaikan studi.

7. Adik tercinta Debi Sintia Date dan adik Dita Renata Date yang selalu memberi semangat, pengertian dan dorongan kepada peneliti.
8. Kepada teman-teman kelas seperjuangan mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Universitas Ichsan Gorontalo yang turut memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
9. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan bantuannya sehingga peneliti bisa melangkah sejauh ini untuk mencapai kesuksesan.
10. Sahabat yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri Febriyanti Mantali, terima kasih untuk semua waktu, bantuan, kebersamaan, pengertian, dan doa yang diberikan.
11. Kepada kepala desa girisa beserta staf desa dan masyarakat desa girisa.

Peneliti ucapkan banyak Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Amin Ya Rabbal Allamin. Peneliti berdoa dan berharap semoga penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Gorontalo, Juni2020

Penulis

Desi Sumanti Date
S2116005

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Partisipasi Masyarakat.....	8
2.1.1 Partisipasi	8
2.1.2 Jenis-Jenis Partisipasi	11
2.1.4 Masyarakat	14
2.1.5 Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2 Tinjauan Pembangunan Desa	21
2.2.1 Pembangunan	21
2.2.2 Aspek-aspek Kapasitas Pembangunan.....	23
2.2.5 Desa.....	25
2.2.8 Pembangunan Desa	31
2.3 Kerangka Pikir	32
BAB III	35
METODELOGI PENELITIAN.....	35

3.1 Objek Penelitian	35
3.2 Metode Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian	36
3.4 Lokasi Penelitian / Tempat penelitian	37
3.5 Sumber Data.....	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	38
3.7 Informan penelitian	38
BAB IV	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Profil Desa.....	40
4.2 Gambaran Umum Pemerintah Desa Girisa.....	54
4.3 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	60
4.4 faktor- faktor yang menghambat partisipasi masyarakat.....	69
4.5 Pembahasan.....	72
BAB V	76
PENUTUP	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DOKUMENTASI	79
Gambar 1. Kantor Desa Girisa	80
RIWAYAT HIDUP.....	94
Pedoman Wawancara.	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu Negara, pembangunan merupakan proses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pengerjaannya tidak asing lagi. Dengan proses pembangunan yang dilaksanakan secara terus menerus merupakan alasan agar mampu tercapai keadaan masyarakat yang semakin baik dan merupakan manfaat dengan jangka yang panjang untuk masyarakat sebagai makna bahwa pembangunan itu proses yang dilaksanakan secara sadar dan disengaja, serta berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Selain itu Pembangunan juga dapat dikatakan sebagai industrialisasi pengejawantahan (industri perwujudan) dari upaya menciptakan pertumbuhan dan kemajuan suatu masyarakat, negara, dan bangsa. Akibatnya pertumbuhan dalam pembangunan tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan batasan yang oleh Siagian dalam (Husain, 2011, hal. 84) “Bahwa pembangunan sebagai rangkaian usaha dengan tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara berencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu bangsa dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) menuju modernitas. Batasan pembangunan tersebut menurut Siagian identik dan saling berkesinambungan dengan pembangunan nasional, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional bahwa

pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Ada dua sasaran dalam misi pembangunan nasional yaitu strategi pembangun Indonesia yang diarahkan yaitu sebagai pemenuhan kebutuhan hak dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hak dasar rakyat tersebut diderivasi kedalam program pembangunan daerah sebagai urusan wajib sehingga pengerjaannya merata dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. kemudian Strategi pelaksanaan pembangunan daerah diderivasi lagi ke desa karena itu merupakan keterkaitan dengan cakupan pembangunan desa. Sedangkan Pembangunan desa jika didefinisikan adalah keterlibatan peran serta nyata dari masyarakat untuk menciptakan tingkat kehidupan yang lebih baik. sedangkan menurut Hartoyo 2001 dalam (Husain, 2011, hal. 87), dan menurut dalam buku (Ndaraha, 1986) Pembangunan Desa merupakan partisipasi yang secara aktif yang dilakukan oleh masyarakat desa dengan harapan dapat menjadi suatu proses yang bermanfaat kedepannya.

Dalam Undang-undang No.6 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mengartikan Desa adalah merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan kepada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.

Desa mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Karena, kualitas Desa yang mempunyai sarana prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang dibandingkan dengan desa yang belum mempunyai infrastruktur kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Alasannya keberhasilan dari kegiatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Seperti penulis ketahui bahwa Desa Girisa kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo yang berpenduduk 995 jiwa ini merupakan desa pedalaman, dalam arti desa girisa ini masih sangat membutuhkan pembangunan. Akan tetapi Masyarakat Desa Girisa yang ini belum sepenuhnya berperan aktif dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan oleh masing-masing masyarakat yang sehari-harinya sebagian mata pencaharian masyarakat yaitu sebagai wiraswasta, pegawai pemerintahan dan sebagian besar nelayan dan petani. Sehingga dalam kegiatan pembangunan Desa kurangnya partisipasi masyarakat seperti kehadiran masyarakat pada rapat yang diadakan belum sesuai yang diharapkan, dan kurangnya sumbangsih pikiran atau ide-ide dalam usaha pembangunan desa.

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang
Petani	97
Nelayan	161
Pedagang	9
Tukang	13
PNS	4
TNI/POLRI	1
Perangkat Desa	12
Wiraswasta	70
Tukang jahit	2
Peternak	1
JUMLAH	370

Sumber: dokumentasi profil desa tahun 2019

Dan untuk mewujudkan tujuan pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan kebijakan pemerintah atau aparat desa untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan infrastruktur desa. Karena pembangunan infrastruktur desa tidak akan terlaksana dengan baik sesuai aspirasi masyarakat apabila tidak ada partisipasi masyarakat.

Demokrasi yang sehat tergantung bagaimana masyarakat mendapatkan informasi yang baik dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu partisipasi masyarakat yang langsung sangat diperlukan dan

perlu serta diperluas. Partisipasi masyarakat secara utuh dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap monitoring dan evaluasi yang menjadi daya dorong untuk mewujudkan sistem manajemen pembangunan yang terpadu menuju peningkatan harkat dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan cara yang paling efektif dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program pemerintah Desa. partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional. agar para pelaksanaanya dapat melaksanakan dan memelihara proyek-proyek infrastruktur yang dibangun, Partisipasi masyarakat haruslah dibina untuk menuju kearah yang baik dan sehat pula. Sehingga keterlibatan pemerintah dalam bidang tersebut menjadi berkurang dan partisipasi masyarakat akan membangkitkan rasa bangga dan menimbulkan rasa tanggung jawab karena keterlibatannya.

Partisipasi masyarakat (community participatory) dapat diartikan sebagai penguatan kapasitas individu dan masyarakat untuk memobilisasi dan membantu dirinya sendiri menuju kemandirian sehingga dominasi pemerintah atas dirinya menjadi sekecil mungkin dan dengan demikian masyarakat dapat mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya lokal yang mereka miliki untuk mencapai kebutuhan yang mereka rasakan bersama (felt needs. Artinya inisiatif

program tidak lagi hanya didominasi pemerintah, tetapi juga berasal dari masyarakat.

Dengan melihat uraian latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini yang berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan masalahnya yaitu :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan Infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.
2. Apa saja Faktor-faktor yang menghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

1.3 Tujuan penelitian

Dengan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa girisa kecamatan paguyaman kabupaten boalemo.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran ilmu dalam melengkapi kajian-kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pembangunan desa.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan untuk pemerintah desa khususnya desa girisa dapat dijadikan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat diberbagai bidang khususnya dalam pembangunan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yakni *participation* yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (Echlos, dan Shadily, 2005 dalam (Husain, 2011, hal. 66) partisipasi diartikan perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi bukan hanya dalam skala yang kecil tetapi juga dalam suatu kegiatan yang berskala besar yang tidak mampu dilaksanakan oleh satu atau dua orang saja bagi kegiatan berskala besar yang membutuhkan ketersediaan dana dan daya yang tidak sedikit seperti halnya dengan pembangunan fasilitas umum, yang sangat berguna bagi masyarakat banyak. Oleh sebab itu, konsep partisipasi selalu dikaitkan dengan kegiatan pembangunan.

Davis & Newstrom dalam (Husain, 2011, hal. 66) mendefinisikan partisipasi sebagai keterkaitan antara mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok sebagai faktor yang mendorong mereka untuk saling memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab, seperti halnya pencapaian tujuan tersebut. Ada tiga gagasan penting dalam definisi ini yaitu keterlibatan, kontribusi dan tanggung jawab.

Inanabrota Bhattachryya dalam (Kasnawi, 2003, hal. 9.2) mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan kesediaan program sesuai

kemampuan setiap masyarakat yang mengorbankan kepentingan diri sendiri dalam membantu berhasilnya setiap program.

Sementara Mubyarto dalam (Kasnawi, 2003, hal. 9.2) mengartikan partisipasi sebagai proses untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Peter du Sautoy dalam (Ndaraha, 1986). Berpendapat bahwa Partisipasi dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah proyek yang bersangkutan merupakan proyek pembangunan desa atau tidak. Yang dapat menghambat partisipasi misalnya Jika masyarakat yang bersangkutan tidak berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan suatu proyek di desanya, maka proyek tersebut pada hakikatnya bukanlah proyek pembangunan desa, sedangkan

Syarat-syarat apa saja yang dapat melaksanakan partisipasi secara efektif menurut Keith Davis dalam (Sastropoetro, 1986, hal. 16) adalah:

1. Waktu

Waktu merupakan pesan yang disampaikan oleh pemrakarsa atau pimpinan kepada masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan. Pesan tersebut mengandung informasi mengenai apa dan bagaimana serta mengapa diperlukan peran serta.

2. Dana

Dana merupakan keperluan. Dalam kegiatan partisipasi misalnya yang diperlukan adalah dana perangsang, yang tujuan utamanya yaitu hendak

dibatasi seperlunya agar tidak menimbulkan kesan “memanjakan”, yang akan menimbulkan efek negative.

3. Subjek

Artinya partisipasi hendaklah saling berkaitan dengan organisasi, dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya/interesnya.

4. Kemampuan

Partisipasi harus memilih dan memilah kemampuan untuk berpartisipasi, artinya yang bersangkutan memiliki luas lingkup pemikiran dan punya pengalaman yang sama dengan komunikator, komunikator harus menumbuhkan unsur-unsur yang berpengalaman.

5. Bahasa

Partisipasi masyarakat harus memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi antara satu dengan yang lain, artinya menggunakan bahasa sama-sama bisa dipahami.

6. Bebas

Bila partisipasi diadakan untuk menentukan suatu kegiatan hendaknya didasarkan kepada kebebasan dalam kelompok, artinya tidak dilakukan pemaksaan atau penekanan yang dapat menimbulkan ketegangan atau gangguan dalam pikiran atau jiwa pihak-pihak yang bersangkutan.

2.12 Jenis-Jenis Partisipasi

Tjokroamidjojo dalam (Husain, 2011, hal. 67) ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi dalam pembangunan yaitu :

1. Strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah turut menentukan arah, terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara.
2. meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya.
3. partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dalam arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan yang berencana.

Cohen dan Uphoff dalam (Husain, 2011, hal. 68) mengemukakan empat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang meliputi:

1. pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan dimaksud adalah masyarakat desa melalui lembaga-lembaga yang ada dan tokoh masyarakat secara bersama-sama menyusun dan menetapkan kinerja aksi dan kinerja hasil dan perencanaan dan program pembangunan desa.

2. pelaksanaan pembangunan.

Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam pemberdayaan, sebab inti dari pemberdayaan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi

pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek

3. menikmati hasil pembangunan.

Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pemberdayaan, maka semakin besar manfaat program dirasakan, berarti program tersebut berhasil mengenai sasaran.

4. mengevaluasi pembangunan.

Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya

Soetrisno dalam (Husain, 2011, hal. 70) mengemukakan dalam pelaksanaan partisipasi ini perlu diperhatikan, yaitu:

1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerja sama antara rakyat dan pemerinatah dalam merencanakan, melaksanakan dan membiayai pembangunan.
2. Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintahan terhadap pembangunan. pembangunan haruslah dianggap suatu kewajiban

moral dari seluruh bangsa ini, bukan suatu ideologi baru yang harus diamankan.

3. Meningkatkan sikap toleransi dari aparat pemernitah untuk masyarakat sebagai salah satu alternatif yang, muncul dalam masyarakat sebagai dinamika pembangunan itu sendiri untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.

2.1.3 Bentuk-Bentuk dalam Partisipasi

- a. Dalam bentuk jasa.
- b. Sumbangan berupa uang dan barang (money and material)
- c. Mendirikan proyek yang donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu
- d. Mendirikan proyek yang dibiayai seluruhnya oleh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas atau rapat desa yang menentukan anggarannya)
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja atau tenaga, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat. Yang tidak bisa memberikan sumbangan dalam bentuk uang bisa menyumbangkan sesuai dengan keahlian masing-masing masyarakat.
- f. Aksi massa atau kerja sama kelompok
- g. Mengadakan pembangunan bersama dikalangan keluarga desa sendiri.

Menurut Bryant dan White dalam (Kasnawi, 2003, hal. 2.35) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi yaitu :

Pertama, partisipasi horisontal dari atas kebawah yaitu suatu bentuk partisipasi yang bersifat kolektif yang ditujukan kepada masyarakat sebagai upaya dalam mempengaruhi berbagai keputusan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kedua, partisipasi vertikal, yakni bentuk partisipasi yang dilakukan anggota masyarakat terbatas hanya kepada mereka yang melakukan hubungan tertentu dengan kelompok elit atau pejabat. Kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan atau manfaat dari adanya partisipasi tersebut.

Ketiga, partisipasi administratif, jenis partisipasi ini seringkali tumpang tindih dengan dua jenis partisipasi sebelumnya. Namun mempunyai pengertian yang lebih luas.

2.1.4 Masyarakat

Seorang filosofi romawi bernama Plato(429-347 SM) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 6.4)mengemukakan bahwa masyarakat sesungguhnya merupakan refleksi dari manusia perorangan.

Soerjono Soekanto 1985 dalam (Kasnawi, 2003, hal. 6.4) telah mengutip pendapat beberapa orang sarjana era terakhir yang mendefinisikan tentang masyarakat (*society*)yaitu seperti berikut ini :

- R.M. Mac Iver dan Charles H. Page (1961) Masyarakat merupakan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, tata cara, wewenang dan kerjasama antara kelompok dan penggolongannya.
- Ralph Linton (1936) Masyarakat merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas yang saling bekerja sama dan hidup cukup lama dalam mengatur diri mereka sendiri.

Horton dan Hunt dalam (Kasnawi, 2003, hal. 6.5) mendefinisikan bahwa masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara bersama-sama dalam waktu yang lama yang secara relatif mandiri dan mendiami suatu wilayah tertentu.

Disamping society terdapat pula istilah community yang juga biasanya diartikan masyarakat. Terjemahan community yang biasa digunakan orang adalah komunitas, kelompok/masyarakat lokal, masyarakat setempat atau masyarakat saja. Pengertian istilah masyarakat setempat biasa ditemukan tidak seragam. Istilah ini bisa menunjuk kepada warga suatu desa kecil. Horton dan Hunt dalam (Kasnawi, 2003, hal. 6.5)

2.1.5 Partisipasi Masyarakat

Menurut Bryant dan White dalam (Ndaraha, 1986, hal. 4.25) partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebut yang mengambil prakasa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi (turutserta). Kemiskinan, kemelaratan, dan

kebobrokan itu sendiri dapat merugikan masyarakat yaitu menurunkan kualitas dan melemahkan semangat serta kemampuan masyarakat itu sendiri. Itulah sebabnya pada fase permulaan gerakan pembangunan desa diberbagai negara, prakarsa (initiative) dan yang disebut partisipasi sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa tidak segera tergerak.

Menurut Bryant dan White dalam (Ndaraha, 1986, hal. 4.28) ada 3 gerakan Partisipasi masyarakat yaitu diantaranya:

1. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat desa .
2. Mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam pembangunan.

Mukerji, Johnston dan Clark dalam (Ndaraha, 1986, hal. 4.29) berpendapat bahwa, antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat desa saling bersangkutan dan saling berkaitan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Adanya kemampuan masyarakat yang berkembang secara mandiri yang dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut.

Saefullah (2007) dalam (Husain, 2011, hal. 105) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang sebenarnya adalah menerima dan melaksanakan kegiatan bersama yang dikerjakan bersama pula agar menjadi manfaat bagi usaha mereka sendiri atas dasar kesadaran dan pengertian terhadap kegiatan tersebut,

Hartoyo dkk (2001) dalam (Husain, 2011, hal. 105) partisipasi masyarakat dalam pembangunan artinya terlibatnya warga masyarakat secara langsung tanpa ada dorongan dari pihak lain, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang meliputi :

1. keterlibatan pemikiran
2. keterlibatan dana
3. keterlibatan tenaga
4. keterlibatan menikmati hasil pembangunan.

Mubyarto 1984 (Ndaraha, 1986, hal. 4.30) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat yaitu kemampuan masyarakat untuk berkembang secara sendiri dan mandiri yang berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri pula.

2.1.6 Faktor Penghambat Partisipasi

Soetrisno dalam theresia (2014: 211) mengidentifikasi ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

A. Pengembangan partisipasi

1. Perencanaan: yaitu partisipasi sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan .

2. Pelaksanaan : yaitu pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih mudah.
 3. Partisipasi masyarakat: sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan asirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan dan pelaksanaan pembangunan.
- B. Perkembangan pembangunan sebagai ideologi
- C. Peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Sementara itu, Dwiningrum (2011: 57), menyebutkan faktor-faktor apa saja yang menghambat partisipasi masyarakat :

- a. Adanya sifat malas
- b. Aspek-aspek tipologis (struktur bahasa)
- c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
- d. Demografis (jumlah penduduk).
- e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal).

Sementara solekhan (2012: 135), mengemukakan dua kategori yang dapat menghambat partisipasi masyarakat, yakni:

- a. Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat

Maksud dari terbatasnya ruang partisipasi masyarakat adalah tempat atau forum yang sebagian besar dapat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat artinya, peluang masyarakat dalam menyumbangkan ide atau gagasan dibatasi oleh makna spasial (tempat). pertemuan maupun media lainnya yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan adil. Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), namun dalam pelaksanaannya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka. Akhirnya forum Musrenbangdes menjadi tidak kapabel untuk memadai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

b. Melemahnya modal sosial

Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012: 139) contoh modal sosial yaitu berupa serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses pada kekuasaan dan sumber daya dimana pembuatan keputusan dan kebijakan dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan sebagainya. Asosiasi tersebut sifatnya eksklusif dan hanya melakukan dan hanya melakukan kegiatan yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa.

Menurut Sunaarti dalam Suryawan (2004: 29) menjelaskan tentang hambatan-hambatan dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang dapat ditemui dalam berbagai kesempatan yaitu :

1. Kemiskinan. Karena kemiskinan merupakan faktor yang mendasar, seseorang akan berfikir lebih banyak untuk melakukan sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya.
2. Pola masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang mempunyai identitas, ras etnis, agama dan budaya yang berbeda dapat menimbulkan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada.
3. Sistem birokrasi. Faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. Seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpacu pada prosedur formal yang kompleks.

Ada dua Faktor yang menghambat partisipasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003: 137-143) yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, tingkah laku individu yang berhubungan erat dengan ciri dan tingkat partisipasi, seperti kesadaran masyarakat, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan yang akan sangat berpengaruh dalam partisipasi tersebut.

b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti dalam jurnal Loka (2003: 9) Yaitu Faktor yang bisa dikatakan petaruh (*stakeholder*), yang artinya yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Sedangkan Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

2.2 Tinjauan Pembangunan Desa

2.2.1 Pembangunan

Pembangunan sesuai GBHN adalah aspek-aspek yang mencapai kesejahteraan masyarakat dalam rangka upaya untuk merubah semua aspek kehidupan yaitu seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jika ditelusuri pengertian pembangunan menurut Philips Roupp (1953) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.2) pembangunan adalah perubahan dari sesuatu yang kurang berarti kepada yang lebih berarti.

Adapun pendapat Mizra (1982) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.2) mengemukakan bahwa pembangunan pada dasarnya adalah usaha-usaha yang dibutuhkan yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik maupun biologi, sosial, dan tentang manusia untuk memahami pembangunan tersebut. Sedangkan menurut S.P. Siagian (1985) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.2) mendefinisikan pembangunan yaitu perubahan yang secara sadar di

rencanakan sebagai suatu usaha oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa.

Bintoro dan Mustopadijaya (1983) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.3) mengemukakan pendapatnya bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak maju, yang harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Dan perubahan sosial budayanya menjadi suatu kekuatan sendiri tergantung pada manusia dan struktur sosialnya, tergantung pada inner willnya, proses emansipasi diri, dan suatu partisipasi yang kreatif dalam proses pembangunan.

Definisi yang dikemukakan oleh Todaro (1983) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.3) “pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemerantasan kemiskinan absolut”. Pembangunan itu haruslah senada dengan sistem sosial dengan kebutuhan dan keinginan individu atau kelompok masyarakat yang bernaung dalam sistem itu, Pembangunan itu pula pada hakikatnya haruslah menyuarakan seluruh nada dasar (gamet).

Bryant dan White (1987) dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.4), mengusulkan agar pembangunan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Agar rakyat pun memperoleh kemampuan yang lebih besar dalam memilih dan memberikan tanggapan terhadap perubahan tersebut. Pengertian ini memberi pemahaman bahwa proyek dan program

pembangunan bukan saja perlu membuahkan perubahann yang sifatnya fisik dan konkret, melainkan juga perlu menghasilkan hal-hal semacam itu dengan cara tertentu.

2.2.2 Aspek-aspek Kapasitas Pembangunan

Seperti yang dikemukakan oleh Bryan dan White dalam (Kasnawi, 2003, hal. 1.5), ada empat aspek dalam kapasitas pembangunan yaitu: 1) pembangunan harus meningkatkan penekanan dan kapasitas . 2) pembangunan harus menekankan pemerataan pada berbagai kelompok masyarakat akan memecah belah masyarakat dan akan menghancurkan kapasitas mereka. 3) pembangunan mngandung arti pemberian kuasa dan wewnang (*empowerment*) yang lebih besar kepada rakyat. 4) pembangunan yang (*sustainable*) yang menjadi pertimbangan utama dalam upaya meningkatkan kapasitaas.

2.2.3 Konsep Infrastruktur

Bachtiar Effendi (dalam Akbar Effendi, 2014) berpendapat, bahwa infrastruktur adalah berupa fasilitas pelayanan umum spserti jalan, air bersih, listrik, jembatan, pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi, dan komunikasi, sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai yang bertujuan agar masyarakat dapaat brgerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi. Infrastruuktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan

fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Mustanir, Barisan, & Hamid (2017).partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur Desa adalah merupakan proses keikutsertaan sekelompok orang yang secara aktif dalam setiap usaha/kegiatan untuk melakukan perubahan secara terus menerus dan terencana guna untuk membawa perubahan yang lebih baik dan terarah yang ditunjang dengan sarana fisik demi tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan bersama.

2.2.4 Jenis-jenis pembangunan infrastruktur

Dalam UU Nomor 42 tahun 2005 tentang Komite percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah melalui peraturan menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah, yaitu transportasi, jalan, pengaliran air minum dan sanitasi telemekatronika, ketenagalistrikan, serta pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah.

Sementara itu, Grigg dalam Mustikawati (2016: 5) apa saja yang termasuk atau yang dikatakan infrastruktur atau fasilitas fisik diantaranya

1. Fasilitas air bersih, dam, transmisi, fasilitas distribusi.

2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali.
3. Fasilitas manajemen limbah padat.
4. Fasilitas transportasi seperti jalan raya, bandara udara, rel kereta api, dan fasilitas kontrol lainnya.
5. Sistem transit publik.
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.
7. Fasilitas pengolahan gas alam.
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi.
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air.
10. Taman tempat bermain, dan fasilitas rekreasi, termasuk stadion.
11. Fasilitas kesehatan misalnya puskesmas

2.2.5 Desa

Menurut Kartohadikusumo dalam (Husain, 2011, hal. 76) Desa adalah suatu masyarakat yang tinggal dalam daerah yang mempunyai satu kesatuan hukum yang mengadakan pemerintahan nya sendiri. Pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan dalam Undang-Undang Pemerintah Desa Nomor 5 Tahun 1979 (Husain, 2011), bahwa Desa adalah suatu wilayah yang didalamnya ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum dan organisasi pemerintah terendah nya langsung di bawah pimpinan camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI .

Ali (2007) dalam (Husain, 2011, hal. 79) mengatakan kekhasan kehidupan desa seringkali nampak pada gejala kontrol sosial dan solidaritas sosial. Terjadinya penyimpangan akan adat istiadat serta norma-norma kehidupan yang ada nampak pada kontrol sosial dalam kehidupan desa itu sendiri, Kepada individu atau kelompok yang melakukan kesalahan atau pelanggaran terhadap hal-hal tersebut minimal sangsi yang diberikan adalah sangsi moral sosial, dan sangsi politis misalnya tidak diikutkan lagi, dan tidak diberikan peran apa-apa dalam setiap kegiatan bersama. Demikian pula dalam solidaritas sosial, warga desa dengan semangat gotong royong mampu mewujudkan sesuatu hal yang monumental seperti membangun gedung untuk kantor dan balai desa, jalan desa dan sebagainya.

Menurut Waddell (1972) dalam (Ndaraha, 1986, hal. 5.21) Desa (Village) merupakan satuan dasar politik Asia Tenggara, desa dipimpin oleh seorang atau sekelompok yang dipilih dari kalangan arif bijaksana, yang mampu memimpin desanya menurut adat yang berlaku. Adakalanya pemimpin itu bertindak sebagai agen pemerintah pusat. Dalam peran gandanya ini ia bertindak, baik sebagai pelindung desanya maupun sebagai petugas pemerintah di desa yang bersangkutan.

Menurut kamus Poerwadarminta (1976) dalam (Ndaraha, 1986, hal. 5.21) Desa adalah: Sekelompok rumah yang berada diluar kota yang merupakan kesatuan kampung, Dusun atau udik.

Lain pula konsep desa dalam istilah rembung desa. Desa dalam hubungan ini mengandung arti fisik dan masyarakat serta pemerintahannya. istilah ini digunakan oleh Sediono Tjondronegoro (1984) dalam (Ndaraha, 1986, hal. 5.22).

2.2.6 klasifikasi atau bentuk-bentuk Desa

Desa dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam, menurut sugihen dalam bukunya (1997: 25) adalah diantaranya :

a. Desa sederhana (Pra Desa)

Desa pada kategori ini disebut sebagai pemukiman sementara, mungkin hanya tempat persinggahan dalam satu perjalanan karena kebiasaan orang-orang yang sering berpindah-pindah, karena tempat tersebut pada saatnya akan ditinggalkan lagi. Pola pemukiman seperti ini mempunyai ciri yang khas. Hampir tak ada orang atau keluarga yang tinggal atau menetap disana, karena semua penghuninya akan pindah lagi pada saat panen selesai, atau bila lahan sebagai sumber penghidupan utama tidak lagi memberi hasil yang memadai. Sifat pemukiman yang demikian tidak memungkinkan tumbuhnya atau berkembangnya berbagai tata kehidupan dan organisasi atau lembaga-lembaga sosial penunjang kehidupan masyarakat termasuk pendidikan, ekonomi, hukum adat, dan hubungan sosial disamping tata kemasyarakatan yang mantap.

b. Desa swadaya

Desa ini bersifat sedenter, artinya sudah ada kelompok (keluarga) keluarga tertentu yang bermukim secara menetap disana. Pemukiman ini umumnya masih tradisional dalam arti bahwa sumber penghidupan utama masyarakatnya masih berkaitan erat dengan usaha tani termasuk meramu hasil hutan, beternak dan memelihara ikan ditambak-tambak kecil. Teknologi pertanian yang dipakai masih rendah, tenaga hewan dan manusia merupakan sumber utama energi teknologi usaha tani yang dipakai. Hubungan antar personal dan atau kelompok (masyarakat) sering didasarkan dan diikat oleh adat istiadat yang ketat. Tingkat pendidikan sebagai salah satu indikator tipologi Desa itu belum berkembang dan Desa-Desa seperti ini jauh dari pusat-pusat kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, prasarana sering kurang memadai dan kurang terpelihara.

c. Desa swakarya

Pada Desa ini, adat yang merupakan tatanan hidup bermasyarakat sudah mulai mendapatkan perubahan-perubahan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam aspek kehidupan sosial budaya lainnya. Adat tidak lagi terlalu ketat mempengaruhi atau menentukan pola perilaku anggota masyarakat. Lapangan pekerjaan sudah mulai kelihatan lebih bervariasi daripada di Desa swadaya. Produksi usaha tani tidak lagi hanya sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diupayakan untuk bisa ditukarkan dengan lain melalui sistem pasar. Produktivitas tenaga kerja bertambah melalui masukan teknologi dan prasarananya relatif sudah

memadai dan terpelihara secara baik. Kendatijarang orng yang suda menamatkan pendidikn sekolah menengah, namun rata-rata orang telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar.

d. Desa swasembada

Merupakan pola desa yang terbaaik dari bentuk-bentuk desa yang terdahulu. Prasarana desa sudah baik, bentuk rumah bervariasi dan memenuhi syarat-syarat pemukiman yang baik. Masyarakat sudah banyak yang berpendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas. Mata pencaharian sudah sangat bervariasi dan kebanyakan masyarakatnya tidak lagi menggantungkan hidupnya pada hasil sektor usaha tani yang diusahakan sendiri. Masyarakat desa swasembada adalah masyarakat yang sudah terbuka dengan masyarakat diluar desanya, pengaruh dari luar itu terlihat dalam perilaku orang-orang desa yang sudah mulai menggunakan teknologi canggih walaupun belum merata. Angkutan umum mudah diperoleh dan banyak masyarakat yang menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan pesawat televisi warna dengan antena parabola. Serta banyak masyarakat yang sudah berpendidikan sarjana.

2.2.7 Keuangan Desa

Menurut M. Hadi dalam soeradi (2014: 7) keuangan publik adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang .

Van Der Kemp dalam Soeradi (2014: 7) mendefinisikan keuangan publik adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Sedangkan keuangan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 Ayat 1 tentang desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta hak dan kewajiban yang berhubungan dengan uang yang dapat menimbulkan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah.

Menurut pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dari mana saja sumber pendapatan desa, yaitu :

- a. Pendapatan asli desa, yang meliputi hasil gotong royong, swadaya desa, hasil usaha desa dan pendapatan desa yang sah lainnya.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- c. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota paling sedikit 10%.
- d. Dana APBD yang perimbangan keuangan pusat dan daerah nya yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% .
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- g. Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan desa yang sah.

2.2.8 Pembangunan Desa

Ada tiga pendapat tentang arti pembangunan guna memahami konsep pembangunan desa yakni :1) pembangunan adalah proses jangka panjang,2) pembangunan adalah menghilangkan ketidaksempurnaan pasar,dan 3) pembangunan adalah industrialisasi Kadimandalam (Husain, 2011, hal. 84)

Menurut buku Pembangunan masyarakat dalam (Ndaraha, 1986, hal. 4.12)pembangunan desa di indonesia diarahkan pada tiga sasaran atau hasil yang diharapkan,yaitu : 1) memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat desa 2) menggerakan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan 3) menumbuhkan kemampuan desa untuk bisa dikembangkan secara mandiri.

Pendapat Jayadinata dan Pramandika (2006) dalam (Husain, 2011, hal. 90)ada dua kegiatan yang dapat membagi pembangunan desa yaitu : 1) proyek produktif yang langsung dilaksanakan dibidang pertanian,dan 2) proyekk produktif yang tidak langsung, melalui pelayanan sosial dan ekonomi,seperti pendidikan,kesehatan,pasar dan pengelolaan hasil.

Menurut Daeng Sudirwo (1981)mendefinisikan pembangunan desaadalah penyelenggaraan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual yang merupakan proses perubahan secara terus menerus.

Dalam GBHN RI Tahun 1999 (TAP.MPR RI:IV/MPR/1999) disebutkan salah satu pembangunan daerah pedesaan yang memepercapat daerah tersebut untuk memberdayakan masyarakat petani dan nelayan melalui penyediaan

prasaran, pembangunan agribisnis, industri kecil dan pembangunan rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Menurut Repelita I, pembangunan desa diarahkan pada usaha-usaha pengubahan sikap mental masyarakat desa, peningkatan bekal pengetahuan dan keterampilan mereka, peningkatan peranan lembaga-lembaga desa. mekanisme usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangunan desa dilaksanakan dengan berimbang dan sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat desa . dan kewajiban pemerintah yaitu untuk menyediakan sarana dan prasarana , serta memberikan bimbingan dan pengawasan, selebihnya diserahkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

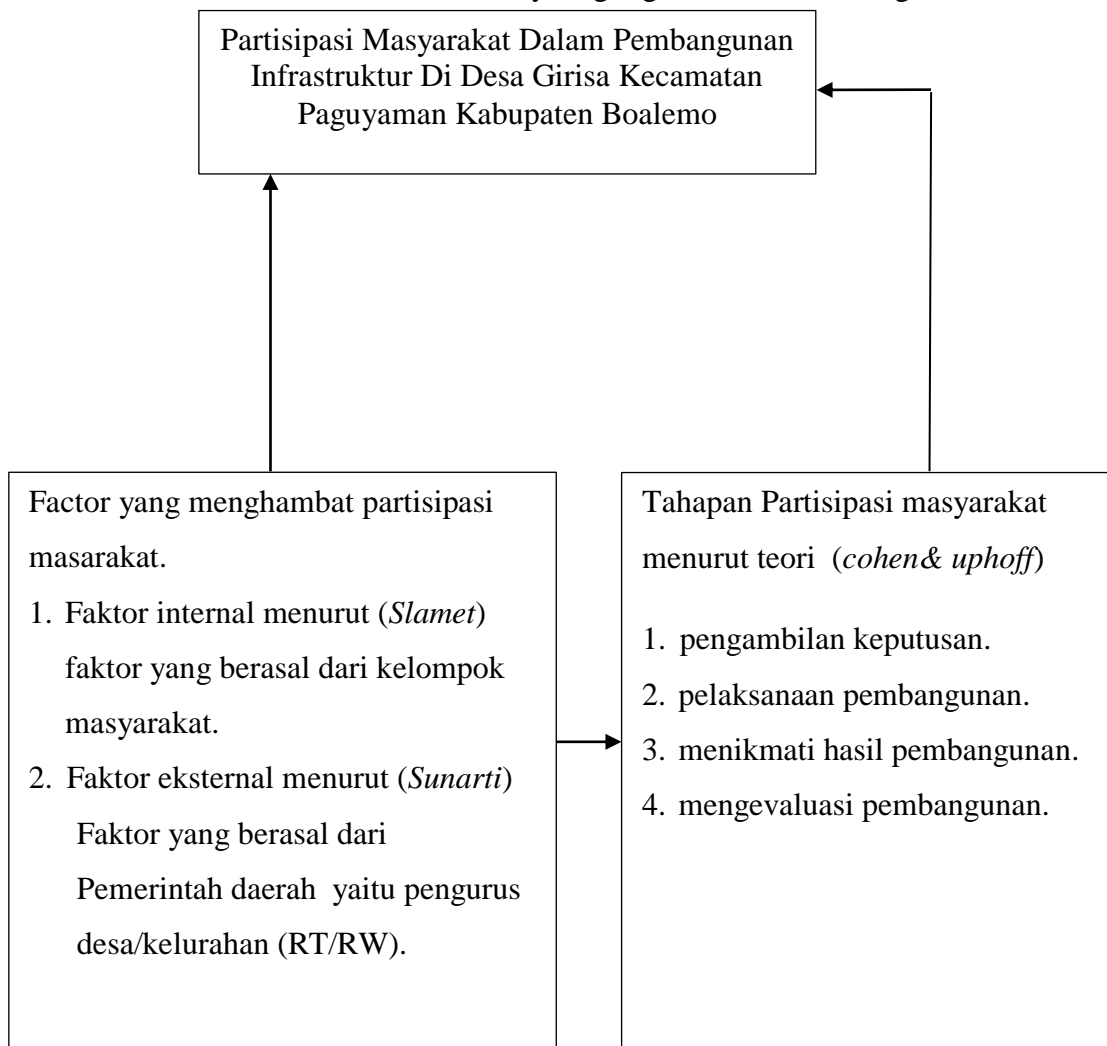
2.3 Kerangka Pikir

Partisipasi masyarakat sangat penting dilakukan pada semua tahap dalam pembangunan desa, yakni mulai perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan (operasi dan pemeliharaan), menikmati hasil dan evaluasi (pemantauan) program pembangunan.

Proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat berlangsung optimal jika keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan waktu, tenaga, uang dalam kepentingan pembangunan dapat ditingkatkan . masyarakat akan lebih memiliki kesempatan secara personal karena sibuk oleh kegiatan individu, tenaga dan dana karena kemampuan finansial yang tidak memadai/kategori pendidikan miskin

serta pendidikan dan pengetahuan yang rendah maka pembangunan yang telah direncanakan akan sulit terealisasi.

Variabel dan sub-variabel dalam yang digambarkan dalam bagan



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti yaitu di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Pembangunan di wilayah tersebut dalam hal ini desa Girisa dipilih sebagai objek yang memiliki hubungan dengan permasalahan dalam hal ini pembangunan infrastruktur yaitu keterbelakangan sektor pembangunan, dan perlu sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi daerah tersebut.

3.2 Metode Penelitian

Pada metode penelitian yang digunakan yaitu penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang artinya Menurut Bogdan dan Taylor (1993) dalam Sudarto (2002: 22) bahwa metodologi kualitatif adalah berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai yang diarahkan pada latar dan individu secara menyeluruh yang menghasilkan data deskriptif

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan fenomena berdasarkan keadaan dilapangan untuk menggambarkan data real dalam bentuk kata dan bahasa. Setelah mendapatkan data maka penulis akan mendeskripsikan pemahaman secara menyeluruh mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Girisa.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian penulis adalah tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diambil dari teori menurut :

1. Cohen dan Uphoff dalam Husain (2011:68)
 - a. Pengambilan keputusan.
 - b. Pelaksanaan pembaangunan.
 - c. Menikmati hasil pembangunan.
 - d. Mengevaluasi pembangun.
2. Faktor-faktor penghambat apa saja yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, yaitu:

- a. Faktor internal

Menurut Slamet (2003: 137-143) Yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, tingkah laku individu yang berhubungan erat dengan ciri dan tingkat partisipasi, seperti kesadaran masyarakat, usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan yang akan sangat berpengaruh dalam partisipasi tersebut.

- b. Faktor eksternal

Menurut Sunarti dalam jurnal Loka (2003: 9) Yaitu Faktor yang bisa dikatakan petaruh (*stakeholder*), yang artinya yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus

desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Sedangkan Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

3.4 Lokasi Penelitian / Tempat penelitian

Lokasi Penelitian atau tempat penelitian ini dilakukan di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo dengan kurun waktu kurang lebih delapan bulan terhitung dari bulan november sampai dengan juni 2020.

3.5 Sumber Data

3.5.1 Data Primer

Data primer adalah Data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, dalam hal ini masyarakat dan aparat desa baik melalui wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data lapangan lainnya, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pemerintah desa dan masyarakat.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan sumber data yang didapat dari literatur ilmiah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur atau materi yang dapat menunjang kegiatan penelitian tersebut.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ditempat penelitian yaitu desa girisa untuk mengetahui objek atau data real yang ada di lapangan seperti berbagai aktivitas masyarakat dalam pembangunan desa tersebut .
2. Wawancara yaitu tindakan dan kegiatan yang melalui proses Tanyajawab lisan antara informan dan peneliti yang berlangsung satu arah, artinya pernyataan dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.
3. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh mengenai buku, dokumen, dan referensi sebagai penunjang.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016: 244) teknik Analisis Data merupakan hasil wawancara, catatan lapangan yang dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain dengan proses penyusunannya dan mencari secara sistematis untuk mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit , menyusun kedalam pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3.7 Informan penelitian

Informan yang diambil dalam penelitian ini yaitu:

Kepala desa	1 orang
Sekretaris	1 orang
Anggota LPM	1 orang
Toko masyarakat	4 orang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diuraikan dibawah ini menyajikan data yang telah diperoleh melalui wawancara,observasi,serta dokumentasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan untuuk mempermudah dalam melakukan proses pembahasan hasil penelitian. Sedangkan uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada focus penelitian yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa girisa kecamatan paguyaman kabupaten boalemo.

4.1 Profil Desa

4.1.1 Sejarah Desa Girisa

Sejarah desa girisa merupakan pemekaran dari Desa Bilato Kabupaten Gorontalo yang masih berstatus dusun girisa namun seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat maka masyarakat melakukan rembuk Desa (musyawarah) untuk membahas pemisahan diri dari Desa Bilato sekaligus pemilihan Pemimpin, maka hasil dari Musyawarah tersebut masyarakat setuju untuk memisahkan diri dari desa bilato dan yang terpilih menjadi kepala desa sementara yaitu bapak Wilson Taliki. Tepat tanggal 12 Februari 2002 terjadilah pembentukan desa dari dusun girisa menjadi desa girisa.Karena desa girisa masih

dikatakan seumur jagung maka sejarah pemerintah desa sampai saat ini masih mengalami pemekaran daerah. Adapun perubahan sejarah kepemimpinan desa girisa adalah yaitu:

Table 4.1.1 Daftar Nama-nama kepala desa selama berdirinya Desa Girisa

Nama-Nama Kepala Desa	Periode	Lama Menjabat	Keterangan
Wilson Taliki	2002-2004	2 tahun	PLH
Sandi M. Taliki	2004-2013	5 tahun	Definitif
Faisal Miyodu	2013	1 tahun	Penjabat
Suwardi Hairi	2013-2019	6 tahun	Definitif
Irwan S.Mantu, S.Pd. MM	2019	2 bulan	Penjabat
Andrias Nonowa, SH	2020-2026	6 tahun	Definitif

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sudah terjadi 6 kali pergantian masa kepemimpinan di Desa girisa. Terbentuknya Desa Girisa dipimpin oleh Bapak Wilson Taliki yang merupakan Kepala Desa pertama pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 Bapak Sandi M. Taliki, pada akhir jabatannya yang ke dua periode yaitu tahun 2013 Bapak Sandi.M Taliki mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dikarenakan telah mencalonkan diri menjadi DPR. Selanjutnya pada tahun 2013 Bapak Faisal Miyodu menjadi Kepala Desa sementara, dan pada tahun 2013 terjadi pergantian kepemimpinan melalui Pesta Demokrasi maka yang terpilih menjadi Kepala Desa yaitu Bapak Suwardi Hairi. dan pada periode

selanjutnya terjadi pemilihan kepemimpinan lagi melalui Pesta Demokrasi, pada saat itu masa jabatan Kepala Desa sebelumnya telah berakhir dan Kepala Desa baru belum dilantik maka yang menjadi Kepala Desa sementara selama 2 bulan yaitu Bapak Irwan S. Mantu, S.Pd. MM. Selanjutnya pada tahun 2020 yang terpilih menjadi kepala desa melalui pesta demokrasi yaitu Bapak Andrias Nonowa, SH.

Dilihat dari kondisi kedua daerah yakni Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo yang sangat jelas batas wilayahnya yakni dibatasi oleh sungai Paguyaman, maka sangat tepat hasil Musyawarah seluruh masyarakat desa memilih berkiblat ke kecamatan paguyaman karena kecamatan paguyaman merupakan bagian dari wilayah kabupaten boalemo.

Pada tahun 2003-2004 di saat Desa Girisa telah terbentuk, mulailah masyarakat disaat desa girisa sudah mulai terbentuk, mulailah masyarakat perlahan-lahan melakukan pembangunan pertama diawali dengan pembangunan infrastruktur yakni mendirikan kantor desa yang sumber dana dari swadaya masyarakat dan gotong royong serta dari PEMDA dan para aktivitis-aktivitis lainnya, sehingga pembangunan kantor desa mencapai 60% dan sudah bisa digunakan untuk pelayanan terhadap masyarakat.

4.1.2 Aspek geografi desa girisa

Desa Girisa terletak dibagian selatan dari Desa Olibuu yang mempunyai luas ± 800 ha dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. luas wilayah: 800 ha

2. jumlah dusun: 4dusun

- a. Dusun I: Tenilo
- b. Dusun II: Dutula
- c. Dusun III: Kramat Indah
- d. Dusun IV: Kramat Jaya

3. Batas Wilayah

Batas-batas wilayah Desa Girisa kecamatan paguyaman Kabupaten Boalemo yaitu sebelah :

- a. Selatan : berbatasan dengan desa olibuu
- b. Utara : berbatasan dengan desa karya murni
- c. Timur : berbatasan dengan sungai paguyaman
- d. Barat : berbatasan dengan desa apitalau

5. Klimatologi

- a. Suhu: $\pm 30-35$ Celcius
- b. Curahan hujan: $\pm 2000/3000$ mm

6. Luas lahan pemukiman: 22,7ha

7. Luas lahan perkebunan: 314,1ha

8. Luas hutan lindung: 428,8ha

4.1.3 StrukturPenduduk

- a. jumlah penduduk desa girisa berdasarkan masing-masing dusun adalah:

Tabel 4.1.3

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		
		LK	PR	Jumlah
1	Dusun Tenilo	105	123	228
2	Dusun Dutula	158	164	322
3	Dusun Kramat Indah	93	92	185
4	Dusun Kramat Jaya	143	117	260
JUMLAH		499	496	995

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Berdasarkan table diatas bahwa Desa Girisa memiliki jmlah pnduduk 995 jiwa. Dengan jumlah untuk Dusun Tenilo 228 jiwa,Dusun Dutula sebanyak 322 jiwa, Dusun Kramat Jaya 185 jiwa, dan untuk Dusun Kramat Indah sebanyak 260 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang Banyak di Desa Girisa makaa smakin brmacam pula tingkt partisipaasi masyarakat,terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

- b. Jumlah penduduk desa girisa berdasarkan kelompok umur

Tabel 4.1.3

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-11	5	4	9
2	1-4	18	19	37
3	5-6	21	11	32
4	7-12	41	57	98
5	13-15	23	35	58
6	16-17	25	22	47
7	18-55	288	275	563
8	56-keatas	80	71	151
JUMLAH		501	494	995

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah penduduk Desa Girisa memiliki jumlah 995jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk dari semuaa tingkatan usia laki-laki 501jiwa dan perempuan 494jiwa. Hal tersebut dapat dinilai bahwasanya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan walaupun perbandingannya tidak cukup jauh.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan sangatlah penting dalam membentuk SDM yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan bangsa dan daerah. misalnya, tingkat pendidikan yang diterima oleh masyarakat memiliki pendidikan formal maupun non formal tentunya akan dapat mempengaruhi kemampuan berpikir dan bertindak lebih dinamis dibandingkan dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali. Adapun keadaan penduduk desa girisa menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.3 Tingkat Pendidikan Desa Girisa dengan jumlah dan persentasinya.

Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)	Persen
Tidak tamat SD	210	23,20 %
SD	434	47,95 %
SMP	142	15,69 %
SMA sederajat	87	9,61 %
D1/D2/D3	4	0,45 %
Sarjana	28	3,09 %
JUMLAH	905	100 %

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan dan presentasinya paling banyak yakni pada tingkat yang lulusan sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 434 orang atau 47,95% dan tingkat pendidikan dengan jumlah paling sedikit yakni diploma D1/D2/D3 sebanyak 4 orang atau 0,45%, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di desa girisa masih banyak yang tidak memiliki sekolah tinggi atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan kejenjang pendidikan kelevel yang lebih tinggi.

4.1.4 Sosial budaya masyarakat Desa Girisa

keadaan desa girisa secara sosial dapat dilihat dari beberapa bidang, yaitu:

a. Keagamaan

Penduduk desa girisa mayoritas beragama Islam dengan jumlah pemeluk agama sebanyak 995 orang, untuk desa girisa terdapat satu kelompok majilis taklim, dan satu kelompok belajar mengaji untuk anak-anak.

Di desa girisa terdapat 2 buah mesjid yang ada di dusun 1 tenilo dan mesjid besar terletak di dusun 4 kramat jaya. Dua infrastruktur tersebut telah dibangun dengan solidaaritas gotong royong antara masyarakat. Hal ini merupakan betapa kuatnya rasa gotong royong yang terpelihara di tengah masyarakat.

a. Pencarian Pokok Masyarakat Desa Girisa

Tabel 4.1.4

Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Orang	Persen (%)
Petani	97	26,21
Nelayan	161	43,51
Pedagang	9	2,43
Tukang	13	3,51
PNS	4	1,08
TNI/POLRI	1	0,27
Perangkat Desa	12	3,24
Wiraswasta	70	18,91
Tukang jahit	2	0,54
Peternak	1	0,27
JUMLAH	370	100

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas tersebut bahwa di desa girisa memiliki beragam pekerjaan, yang merupakan mata pencaharian masyarakat desa girisa. Namun karena desa girisa merupakan desa yang berada diantara pesisir pantai dan gunung. Jadi sebagian besar mata pencaharian desa girisa yaitu sebagai nelayan dengan jumlah 161 jiwa atau (43,51%), dan petani sebanyak 97 jiwa atau (26,21 %).

4.1.5 Saran dan prasarana

Sarana dan prasaran juga menjadi tujuan pembangunan di desa girisa. Karena sangat diperlukann untuk menunjang segala aktifitas kehidupan. Baik sarana dan prasaran dibidang pendiidikan, social maupun bidang ekonomi. Salah satu tujuan pembangunan sarana prasarana yaitu:

1. Pembangunan dan peningkatan sarana infrastruktur desa.
2. Pembangunan dan pengadaan untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih.
3. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, agar terciptanya suasana aman dan nyaman bagi masyarakat.

Tabel 4.1.5 Sarana dan Prasaran Pembangunan

No	SaranaPrasarana Pembangunan	Jumlah
1	Prasarana umum	
	a. Jalan	8650m
	b. Jembatan	4
	c. Plat duicker	10
	d. Masjid	2
2	Prasarana pendidikan	
	a. gedung Paud (pendidikan anak usia dini)	1

	b. gedung TK (taman kanak-kanak)	1
	c. gedung SD (sekolah dasar)	1
	d. gedung SMP (sekolah menengah pertama)	1
	e. taman pendidikan Al-Quran	1
3	Prasarana kesehatan	
	a. Posyandu	1
	b. MCK	4
	c. Sarana air bersih	2
	d. Jamban keluarga	165
4	Prasarana ekonomi	
	a. Warung/toko	14
5	Kelompok usaha ekonomi produktif	
	a. Jumlah kelompok usaha	4
	b. Badan usaha milik desa (BUMDes)	1
6	Aset berupa modal	
	a. total aset produktif	3
7	Sarana transportasi darat	
	a. truck	2
	b. ojek	10
8	Sarana transportasi laut	

	a. perahu motor	50
--	-----------------	----

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

4.1.6 Pembangunan infrastruktur yang sudah dilaksanakan di desa girisa dari tahun 2015 sampai 2019

Tabel 4.1.6

Tahun	Kegiatan pembangunan	Sumber anggaran
2015	Raban beton dusun dutula/tenilo 265m	Dana Desa
	Pembangunan jembatan 4 unit	Dana Desa
	Pembangunan plat duicker 1 unit	Dana Desa
	Pembangunan saluran 173m	Dana Desa
	Pembangunan spal 1 unit	Dana Desa
	Pembangunan 1 lokal SMP 1 9X7 RKB	DAK
	Rehapan 1 lokal SD	DAK
	Pembangunan jalan rabat beton dusun kramat indah 100m	PPIP
	Pembangunan jalan akses desa dusun tenilo dan dutula 583m	PPIP
	Pembangunan talut dusun tenilo	PPIP

	24m	
2016	Pembangunan jamban keluarga 40 unit	Dana Desa
	Perbaikan sumur gali di dusun tenilo 1 unit	Dana Desa
	Pembangunan jalan tangga 70m dusun kramat jaya	Dana Desa
2017	Peningkatan jalan poros desa 615m	Dana Desa
	Peningkatan rabat beton 80m	Dana Desa
	Peningkatan jalan rabat beton 111m	Dana Desa
	Pembangunan Plat Duicker 1 unit	Dana Desa
	Pembangunan tembok penahan tanah 60m	Dana Desa
	Pembangunan selokan Drainase	Dana Desa
	Pembangunan jamban keluarga 30 unit	Dana Desa
2018	Pembangunan PAUD Holistik	Dana Desa
	Pembangunan drainase 80m	Dana Desa
	Pembangunan jalan rabat beton	Dana Desa

	50m	
	Pengadaan penerangan tenaga surya 5 unit	Dana Desa
	Pembangunan jalan menuju lapangan bola kaki	DAU
	Pembangunan pengaman banjir	APBD II
2019	Pembangunan jalan rabat beton 275m X 4m	Dana Desa
	Pembangunan tembok penahan tanah 40m	Dana Desa
	Pembangunan Spal 70m	Dana Desa
	Pembangunan drainase di dusun kramat indah 80m	Dana Desa
	Pembangunan drainase di dusun dutula 90m	Dana Desa
	Pengadaan lampu PLTS/PJU 12 unit	Dana Desa
	Pengadaan perahu piber 6 unit	Dana Desa

Sumber: dokumentasi profil desa girisa tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai 2019 sudah banyak pembangunan infrastruktur yang sudah di lakukan di desa girisa terutama dalam pembangunan rabat beton dan pembangunan drainase yang

hampir sering dilakukan setiap tahunnya. Dan setiap pembangunan infrastruktur hampir semua dibiayai oleh anggaran Dana Desa.

4.1.7 Pemerintahan

Desa girisa menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa secara Demokrasi yang artinya kekuasaan berada di tangan rakyat atau masyarakat. yang berasaskan Pancasila, UUD 1945, Bineka Tunggal Ika dan NKRI. Untuk mencapai penyelenggaraan pemerintah desa bisa berjalan dengan baik perlu adanya pembangunan dan penataan sistem yang baik atau sesuai dengan kerangka program RPJM-Desa dan peraturan daerah sebagai acuan.

4.2 Gambaran Umum Pemerintah Desa Girisa

4.2.1 Visi dan Misi Desa Girisa

Visi

Visi Misi pembangunan Desa Girisa menyatu pada Visi, dan Visi Desa Girisa Kabupaten Boalemo yang sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa Terpilih mulai berlaku tahun 2020 sampai dengan 2026 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA DESA SEJAHTERA YANG BERDAYA SAING”

Misi

1. Merancang pembangunan yang tepat sasaran dan berdaya saing.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani dan nelayan.
3. Memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat melalui Pendidikan, Kesehatan, Posyandu, Ibu hamil, Balita, dan Lansia.
4. Memberdayakan segala potensi desa. yaitu:
 - a. Sumber Daya Alam (SDA)
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - c. Ekonomi Masyarakat.
5. Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Girisa Yang Meliputi:
 - Pengelolaan keuangan yang transparan dan professional
 - Pelayanan kepada masyarakat yang cepat dan benar
 - Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan yang mengedepankan aspek prioritas terukur dan tepat sasaran
 - Penguatan terhadap lembaga adat istiadat sebagai peran penting lestariannya kearifan budaya local desa
 - Penguatan kelembagaan Desa BPD, LPM, Dasawisma, Lembaga adat, BUMDes, dan Karang Taruna
 - Optimalisasi fasilitas keagamaan, olahraga, wisata dan kesenian

4.2.2 Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, tujuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan

2. Memenuhi kebutuhan sarana prasarana yang memadai
3. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan potensi desa secara tepat guna
4. Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
5. Menjalin hubungan kelembagaan yang harmonis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa

4.2.3 Sasaran

1. Partisipasi atau peran aktif masyarakat dan lembaga dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan desa
2. Mandiri dalam melakukan partisipasi dalam perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan serta pemantauan terhadap sistem tata kelola pemerintahan desa
3. Pengambilan keputusan menyangkut program kegiatan pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Pemerintah desa dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal juga profesional kepada warga masyarakat berdasarkan tupoksi masing-masing perangkat desa. Sehingga masyarakat dapat dilayani dengan baik sesuai dengan kebutuhannya baik dalam urusan administrasi pemerintahan, kependudukan, maupun sosial kemasyarakatan lainnya
5. Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, harus ada komunikasi dan koordinasi antara lembaga.

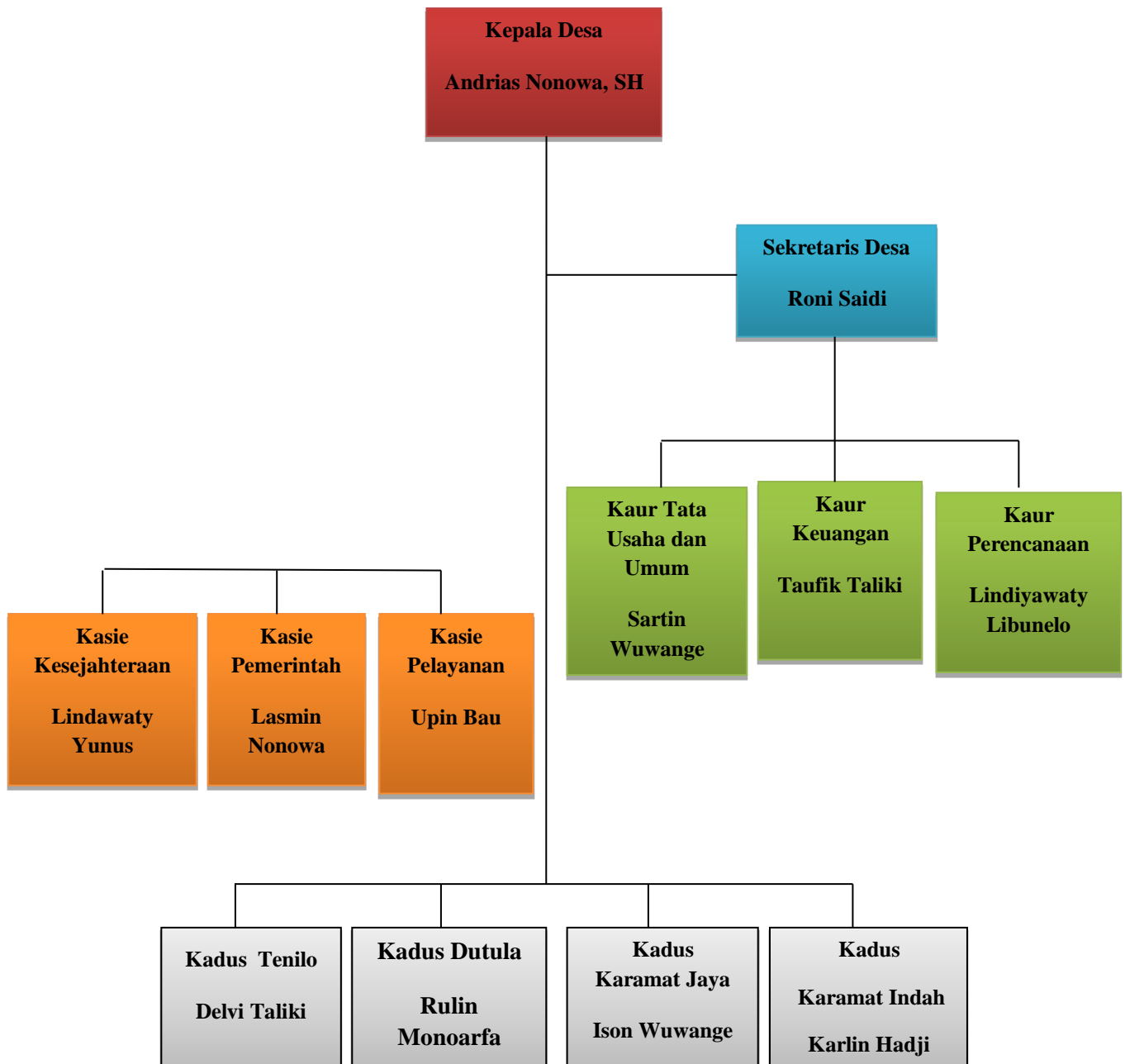
4.2.4 Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa

Mengaju pada permasalahan yang dihadapi oleh desa berdasarkan pengkajian keadaan maka secara umum sasaran program pembangunan desa yakni:

1. Sistem pemerintah desa
 - a. Peningkatan kapasitas perangkat kapasitas desa dan lembaga desa
 - b. Penyediaan fasilitas dan sarana penunjang pelaksanaan pemerintahan desa
 - c. Pengelolaan administrasi yang akurat
 - d. Menyediakan fasilitas informasi dan komunikasi
2. Sarana prasarana
 - a. Pembangunan dan peningkatan sarana infrastruktur
 - b. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana untuk menciptakan lingkungan desa yang bersih
 - c. Pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, agar terciptanya suasana aman dan nyaman bagi masyarakat desa
3. Ekonomi produktif
 - a. Mewujudkan perekonomian masyarakat desa yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan
 - b. Menyediakan fasilitas penunjang pengelolaan hasil pertanian dan perikanan

- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mengelola produk unggulan desa
- 4. Sosial budaya dan keagamaan
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam bidang keagamaan
 - b. Menumbuhkembangkan minat dan bakat masyarakat dalam bidang olahraga dan kesenian
- 5. Pendidikan dan kesehatan
 - a. Pembangunan sarana yang menunjang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
 - b. Kegiatan pelayanan kesehatan warga masyarakat
 - c. Peningkatan kualitas pendidikan

4.2.5 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA GIRISA

4.3 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur

Berhasilnya suatu proses pembangunan tidak dapat terlepas dari adanya partisipasi masyarakat, karena merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan, secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dimana pembangunan yang berhasil berarti yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah itu sendiri yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat tersebut. Dalam hal ini untuk mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijakan pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat ditentukan melalui:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
yaitu memberikan ide-ide pikiran dalam forum atau rapat Musrenbang
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
Dalam bentuk tenaga, uang, atau material
3. Partisipasi dalam tahap evaluasi
guna mengetahui tujuan yang dicapai
4. Partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan
perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan.

Bentuk partisipasi yang dapat ditunjukkan masyarakat Desa Girisa yaitu salah satunya ikut dalam proses Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

(Musrenbangdes). Adapun daftar usulan masyarakat dalam musyawara rencana pembangunan desa, yaitu:

Tabel 4.3 daftar usulan dalam Musrenbang Desa tahun 2020

No	Usulan Kegiatan
1	Pembangunan rumah layak huni
2	Pengadaan lampu PJU
3	Pembangunan jamban keluarga
4	Rehab rumah warga miskin
5	Pengadaan meteran listrik
6	Pembangunan rumah sehat
7	Pengadaan perahu piber
8	Pelayanan kesehatan
9	Pelayanan pendamping lansia
10	Pengadaan penambahan modal usaha mikro
11	Pemberian beasiswa terhadap pelajar/mahasiswa
12	Pembangunan spal pemukiman
13	Pengadaan pendidikan non formal
14	Pembangunan jalan rabat beton
15	Pembangunan penahan banjir
16	Pembangunan penambahan bois
17	Pembangunan pemagaran pustu

18	Pembangunan pemagaran masjid
19	Pembangunan batas dusun
20	Pengadaan seragam pemangku adat
21	Pengadaan PMT, bayi, balita, dan ibu hamil
22	Pengadaan susu bayi, balita, dan ibu hami
23	Pengadaan mesin temple 15 dan 40 PK
24	Pengadaan seragam majelis taqlim
25	Pengadaan mesin semprot
26	Motor box
27	Pembangunan bak sampah
28	Pengadaan tukang 1 paket
29	Pembangunan sumur suntik
30	Pembangunan jembatan gantung

Sumber: Data RPJM desa girisa tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 30 program usulan kegiatan yang dimusyawarkan dalam perencanaan pembangunan Desa Girisa. Program tersebut berasal dari usulan masyarakat sendiri yang turut hadir berkontribusi dalam memberikan ide-ide atau sumbangsih pemikiran. Akan tetapi dari semua jumlah usulan tersebut tidak semuanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa Girisa, karena dilihat dari kondisi desa dan dana desa, pemerintah hanya akan melaksanakan program sesuai kebutuhan masyarakat. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Girisa bapak Andrias Nonowa S.Hbahwa :

“Dalam pembangunan di Desa Girisa itu adalah hasil dari apa yang kita musyawarakan bersama masyarakat, awalnya yaitu hasil dari musyawarah dusun kemudian dirapatkan kembali dalam rapat musyawarah rencana pembangunan desa di kantor desa girisa yang disepakati bersama yang akan menjadi bahan pemerintah yang akan dilaksanakan di desa untuk masyarakat. Dalam hal ini masyarakat telah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Dari hasil wawancara Kepala Desa dapat simpulkan bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat yaitu hadir dalam rapat musrenbang

Pada tahap perencanaan inilah masyarakat Desa Girisa mulai mempersiapkan bagaimana rancangan kedepan bagaimana pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena proses dari perencanaan merupakan suatu prosedur yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini perbaikan pembangunan infrastrukturnya yang menjadi salah satu upaya pemerintah setempat untuk mensejahterakan masyarakat Desa Girisa.

Tabel 4.3 Rencana kerja pembangunan infrastruktur Desa Girisa Tahun 2020

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Target Volume	Keterangan
1	Pembangunan gerbang desa, batas desa dan dusun	Desa girisa	7 unit	Baru

2	Pembangunan tanggul/bois	Dusun dutula/tenilo	600 meter	Lanjutan
3	Pembangunan SPAL	Desa girisa	5000 meter	Lanjutan
4	Pembangunan jalan tani	Desa girisa	20.000 meter	Baru
5	Pembangunan jembatan mini		3 unit	Baru
6	Pembangunan Abrasi sungai	Desa girisa	1.000 mter	Baru
7	Pembangunan sumur gali	Desa girisa	16 unit	Bau
8	Pembangunan selokan	Desa girisa	3000 meter	Lanjutan
9	Pembangunan jalan setapak	Dusun tenilo	2000 meter	Baru
10	Pembangunan tandon air bersih	Desa girisa	8 unit	Baru
11	Pembangunan drainase	Dusun tenilo	7.500 meter	Lanjutan
12	Pembangunan Abrasi sungai	Dusun dutula	1000 meter	Baru

Sumber: Data RPJM desa girisa tahun 2020

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang secara umum mewarnai masyarakat Desa Girisa ikut dalam pembangunan infrastruktur menurut penulis yaitu, partisipasi dalam bentuk ide atau pemikiran dalam artian (non fisik), uang (dana), material (bahan), dan partisipasi secara langsung seperti tenaga/fisik. Keempat aspek tersebut dapat dilihat melalui hasil penelitian sebagai berikut:

4.3.1 partisipasi dalam Pelaksanaan Perencanaan (Partisipasi dalam menyumbangkan ide/pemikiran (non fisik))

Keberhasilan suatu pembangunan tidak lepas dari adanya putusan yang melalui tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Pada tahap tertentu partisipasi

masyarakat secara langsung sangat dibutuhkan, mengingat ide atau pemikiran dari masyarakat merupakan awal proses pembangunan di Desa Girisa. Setiap program yang sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa mengorbankan diri sendiri merupakan hal penting yang harus. Terutama dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi. sebab itu partisipasi non fisik masyarakat sangat mendasar sekali, terutama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat. Semakin besar keinginan untuk menentukan nasib sendiri semakin besar pula partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala desa girisa Andrias Nonowa. S.H, yakni:

“program pembangunan yang ada di Desa Girisa sebagian besar merupakan hasil musrenbang yang dilaksanakan bersama masyarakat Desa Girisa, secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan merupakan awal dari partisipasi masyarakat Desa Girisa. Walaupun tidak semua masyarakat bisa hadir untuk menyumbangkan ide dan gagasan mereka. Jadi mereka “masyarakat” memang sudah turut berpartisipasi”.

Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat Astuti

Ambodi Desa Girisa:

“mengusahakan selalu hadir dalam rapat musrenbang dan memberikan ide-ide atau sumbangsih pemikiran seperti pembuatan jalan setapak, lampu-lampu mercuri dan plat deker”.

Dari hasil wawancara informan Kepala Desa dan Masyarakat dapat peneliti simpulkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi dalam rencana pembangunan dengan cara mengusulkan ide-ide atau pemikiran dalam rapat musrenbang.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk non fisik adalah masyarakat keterlibatan masyarakat dalam memberi ide-ide atau sumbangsih pikiran dalam proses pelaksanaan pembangunan. Partisipasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam kesempatan seperti melalui pertemuan/rapat, saran dan tanggapan terhadap pembangunan infrastruktur.

Penyaluran ide dan pemikirannya dapat disalurkan lewat lembaga-lembaga formal yang ada di Desa. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di Desa Girisa dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti rapat desa dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran pada pertemuan.

4.3.2 Partisipasi dalam pelaksanaan (Dalam bentuk tenaga, uang, atau material)

Dalam usaha mengerjakan proses pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama untuk menentukan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Seperti diketahui, pembangunan tanpa dana yang memadai maka proses pembangunan tidak akan sempurna dan ini merupakan hal umum yang dialami setiap daerah tidak terkecuali di Desa Girisa. Dan yang tidak kalah penting adalah sumbangsih masyarakat dalam bentuk material, tenaga atau fisik merupakan salah satu pendorong untuk pelaksanaan pembangunan tergantung dari tanggung jawab masyarakat yang ada di Desa Girisa. Hal sesuai pernyataan Kepala Desa Girisa Bapak Andrias Nonowa S.H:

“untuk partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau material tergantung dari pembangunan itu sendiri, karena tidak semua pelaksanaan pembangunan membutuhkan partisipasi masyarakat. Tetapi dalam pembangunan infrastruktur seperti memperbaiki mesjid saya selalu menghimbau masyarakat agar berpartisipasi sesuai keikhlasan dan kemampuan entah itu dana atau material. Karena pada pembangunan mesjid tidak ada dana dari pemerintah atau dana Desa”.

Hal tersebut senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Girisa Bapak Roni Saidi.

“partisipasi masyarakat dalam bentuk dana itu sesuai kemampuan masyarakat sendiri, dari desa tidak memaksa atau menentukan nilai. Tapi kalau untuk material mungkin masyarakat belum bisa mengadakannya. Dan untuk partisipasi tenaga atau fisik dalam pembangunan mungkin yang bisa masyarakat berperan aktif yaitu dalam pemeliharaan pembangunan infrastruktur tersebut seperti hadir dalam kegiatan bakti sosial yang diadakan setiap jumat”.

Begitupula pernyataan dari salah satu anggota LPM di Desa Girisa saat diwawancara:

“Untuk partisipasi dalam bentuk dana, material atau tenaga masyarakat tergantung pembangunannya, karena saya ketahui setiap pembangunan Desa pasti ada dana desanya dari pemerintah, kecuali pembangunan yang inisiatifnya dari Kepala Desa sendiri yang membutuhkan partisipasi masyarakat barulah kita akan berpartisipasi entah itu dana atau material untuk mendukung tercapainya pembangunant, dan untuk partisipasi tenaga/fisik saya berusaha hadir dalam bakti sosial atau gotong royong untuk pemeliharaan pembangunan infrastruktur seperti membersihkan jalan, mesjid dan pembersihan pipa air yang tersumbat. yang diadakan setiap hari jumat”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkn bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk nyata tergantung progrm pembangunan itu sendiri apakah membutuhkan partisipasi masyarakat atau tidak, dan menurut masyarakat menganggap bahwa dana desa dapat membiayai segala keperluan pembangunan yang ada di Desa Girisa.

4.3.3 Partisipasi dalam tahap evaluasi

guna mengetahui tujuan yang dicapaidan mengetahui apakah tujuan yang dicapai sudah sesuai dengan harapan. Maka untuk memperoleh umpan balik tentang masalah/kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan, harus ditandai dalam Bentuk partisipasi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan sangatdiperlukan. Sesuai dengan pernyataan Sekretaris desa girisa Bapak Roni Saidi

“Pembangunan infrastruktur yang ada di desa girisa sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan dibutuhkan masyarakat contohnya pembuatan saluran draines hingga pada proses pelaksanaannya yang sudah terbilang baik dalam hal ini berupa besarnya volume material yang dipakai hingga pada proses pengerjaannya yang sudah memenuhi syarat yang ada”.

4.3.4 Partisipasi dalam menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan

Perlu adanya partisipasi masyarakat dengan kemauan dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan, misalnya: memanfaatkan pembangunan jalan, atau mesjid dan sebagainya. Seringkali masyarakat tidak memahami manfaat dari setiap program pembangunan secara langsung, sehinggahasil pembangunan menjadi sia-sia. Sesuai dengan pernyataan salah satu masyarakat desa girisa bapak Tono, yaitu:

“Dengan adanya pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat contohnya seperti pembangunan mesjid yang diperluas sehingga bisa menampung banyaknya masyarakat atau jamaah untuk melakukan sholat berjamaah, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dulunya becek dan berdebu, alhamdulillah sudah bagus”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur di desa girisa telah dinikmati oleh masyarakat dan sudah dimanfaatkan untuk kelangusngan hidup dengan baik oleh masyarakat.

4.4 faktor- faktor yang menghambat partispasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah kunci utama agar pembangunan merupakan kunci utama agar berhasilnya pembangunan infrastruktur di Desa Girisa. Dilaksanakannya roda pemerintah dan dibukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program yang direncanakan menjadikan pelaksanaan pembangunan disuatu Desa berhasil dalam mencapai kesejahteraan. Faktor penghambat yang sering ditemukan yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat berpartisipasi dalam mengamankan, memelihara dan memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Girisa. Sesuai dengan pernyataan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai guru honor bapak Ronal yang ada di Desa Girisa, yaitu:

“sebagai guru saya kurang berpartisipasi dalam kegiatan desa, seperti tidak bisa hadir dalam rapat rencana pembangunan untuk berbagi ide-ide pemikiran, mengingat saya harus mengutamakan pekerjaan saya sebagai guru yang harus mengajar setiap harinya”

Hal tersebut senada dengan pernyataan salah satu tokoh masyarakat Sona Hadji yang ada di Desa Girisa:

“saya kurang berpartisipasi dikarenakan pekerjaan saya sebagai petani yang pergi kerja dari pagi sampai sore hari, terkadang saya harus menginap di kebun”

4.4.1 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi

Ikut serta dalam proses pembangunan bukan timbul begitu saja, tetapi krena ada yang mendorongnya untuk berpartisipasi. Salahsatunya faktor kesadaran masyarakat sendiri.

Proses dari pembangunan di Desa Girisa tidak hanya membutuhkan tanggungjawab bersamaa akan tetapi dibutuhkan faktor kemauan untuk ikut langsung menyelesaikan pembangunan yang ada. ini dimaksudkan agar apa yang menjadi cita-cita pembangunan yakni memberikan hidup sejahtera kepada masyarakat. Demikian pula dengan masyarakat Desa Girisa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sekretaris Desa Roni Saidi, yakni:

“Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut yaitu hasil dari apa yang telah dimusyawarkan bersama masyarakat, akan tetapi kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang karena mereka akan berpartisipasi jika pembangunan yang dilaksanakan sesuai ide yang mereka usulkan”.

Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi tergantung pembangunan yang diusulkan.

4.4.2 Peran serta kepala Desa

Peran kepala desa dalam melibatakan masyarakat dalam proses pembangunan desa dalam hal ini infrastruktur sangat diperlukan , kepala desa mempunyai peran penting untuk mendorong masyarakatnya agar mau terlibat dan turun langsung dalam pembangunan di desa mereka yaitu desa Girisa kecamatan paguyaman kabupaten boalemo. Karena tujuan dari pembanngunan itu tidak akan

terwujud apabila tidak ada keterlibatan masyarakat didalamnya. Sesuai dengan pernyataan salah satu anggota LPM Desa Girisa.

“Kepala Desa sangat berperan aktif contohnya turun langsung untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengikuti setiap kegiatan bakti sosial untuk pembersihan jalan, memperbaiki pipa air yang bocor, membersihkan mesjid atau pembangunan lainnya”.

4.5 Pembahasan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur adalah kesadaran yang tidak bisa muncul dengan sendirinya, oleh karena itu, kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah mengenai apa sebenarnya yang dibutuhkan, partisipasi masyarakat yang muncul adalah adanya dukungan dari mereka yang merupakan dorongan bagi pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. pembahasan yang ditelusuri berdasarkan indikator-indikator, yaitu :

a. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat karena masyarakat dapat mengemukakan setiap pendapat dan menentukan keputusan-keputusan atau kebijakan apa yang akan diputuskan dan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dibebaskan memberikan usulan atau ide-ide, saran dan kritik tentang pembangunan infrastruktur desa dengan cara melalui rapat atau pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pemerintah desa telah melakukan usaha

usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai pembangunan desa, dan masyarakat pun telah berpartisipasi hadir dalam rapat tersebut, tetapi masih ada masyarakat yang masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga pada saat diadakan rapat mengenai pembangunan desa kehadiran dari masyarakat masih kurang atau rendah.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Pada dasarnya partisipasi dalam pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan berupa bantuan tenaga dan sumbangan dana. Sifat gotong royong serta kesadaran dari setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. karena pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati yang nantinya akan merasakan dampak positif dari setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri.

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa untuk partisipasi dalam bentuk tenaga atau dana tergantung pembangunan yang dilaksanakan di desa girisa, karena sebagian besar pembangunan infrastruktur di desa girisa mempunyai dana tersendiri dari pemerintah, tetapi partisipasi dalam bentuk

gotong royong masyarakat desa girisa telah melakukannya, dilihat dari bakti sosial yang diadakan setiap hari jumat.

c. Partisipasi Dalam menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan

Dalam partisipasi ini perlu adanya partisipasi masyarakat dan kesukarelaan untuk memanfaatkan hasil pembangunan. Karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan hasil pembangunan.

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sudah ada masyarakat yang telah menikmati atau memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di desa girisa. Untuk itu Hal yang diperlukan oleh pemerintah dan setiap masyarakat yaitu saling membantu memperhatikan setiap bangunan desa yang sudah dibangun untuk dapat digunakan setiap saat dan yang bisa digunakan dalam waktu yang lama.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi Partisipasi

dalam evaluasi hasil pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap pembangunan yang sedang berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan pembelajaran dan bahan pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kedepan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh salah satu pemerintah desa telah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur

yang dilaksanakan di desa girisa sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan dibutuhkan masyarakat desa girisa.

e. faktor penghambat

- faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, tingkah laku individu yang berhubungan erat dengan ciri dan tingkat partisipasi.

Dari wawancara di atas dikatakan partisipasi masyarakat masih kurang karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyadari bahwa pentingnya kehadiran tersebut untuk rencana pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

- faktor eksternal

Yaitu Faktor yang bisa dikatakan petaruh (*stakeholder*), yang artinya yang mempunyai kepentingan dalam program ini adalah pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator.

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah desa atau kepala desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berperan aktif dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam gotong royong.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab IV yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa

Pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa ini sangatlah berpengaruh besar terhadap jalannya proses pembangunan infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman kabupaten Boalemo, penyelenggaraan pembangunan bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah desa saja tetapi tanggungjawab bersama masyarakat secara keseluruhan, salah satu wujud tanggung jawab yang dimaksud adalah dengan adanya keterlibatan atau partisipasi aktif dari masyarakat.

- a. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan pembangunan infrastruktur di Desa Girisa Kecamatan Paguyaman

Kabupaten Boalemo telah melibatkan masyarakat, namun keterlibatan masyarakat masih rendah karena hanya sebagian masyarakat yang ikut rapat musrenbang terkendala waktu dan kegiatan lainnya. Adapun kendala yang menghambat keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan tersebut yaitu terkendala untuk mengikuti rapat proses pembuatan keputusan atau perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Girisa disebabkan terkendalanya masalah waktu dan pekerjaan.

- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Girisa, mereka sudah menunjukkan keaktifan/keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa, seperti berpartisipasi dalam bentuk tenaga, sumbangan materi.
- c. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur desa dapat dilihat dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat yang senang memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur seperti mesjid dan jalan yang telah diperbaiki. yang sudah ada banyak memberikan manfaat bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa Girisa.
- d. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan infrastruktur di Desa Girisa tidak dilibatkan karena masyarakat hanya bisa menikmati hasil pembangunan yang sudah ada, karena untuk pengevaluasian sudah ada tim survei tersendiri.

2. Dalam pembangunan infrastruktur di desa girisa ada faktor yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi yaitu rendahnya tingkat kesadaran dan kebiasaan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi, karena lebih mengutamakan kesibukan masing-masing.

5.2 Saran

1. agar partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur maksimal, pemerintah harus lebih memberikan sosialisasi atau pengarahan ke masyarakat dalam bentuk penyuluhan yang melibatkan masyarakat, agar masyarakatnya memiliki keinginan ikut terlibat dalam kegiatan pembangunan.
2. Dalam hal penilaian untuk hasil pembangunan infrastruktur desa sebaiknya masyarakat diberi ruang atau kesempatan untuk menilai hasil pembangunan yang ada sehingga pembangunan yang ada dan selanjutnya dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasiru, R., & Jasin, M. (2009). *Pembangunan Berdasarkan Dinamika Masyarakat*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Husain, W. (2011). *Participative Leadership*. Bandung, Jawa barat: MQS Publishing.
- Kasnawi, T. (2003). *Pembangunan Masyarakat Kota*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Makmur. (2009). *teori manajemen stratejik dalam pemerintahan dan pembangunan*. bandung: refika aditama.
- Muljana, B. (2011). *perencanaan pembangunan nasional*. yogyakarta: universitas indonesia.
- Ndaraha, T. (1986). *Materi Pokok Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Karunika Jakarta.
- Prastowo, a. (2012). *metode penelitian kualitatif dalam perspektif rancangan penelitian*. yogyakarta: AR-RUZZ media.
- Sastropetro, S. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni Tahun 1986.
- Sudriamunawar, H. (2012). *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tjokroamidjojo, B. (1980). *perencanaan pembangunan*. jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Widjaja, H. (2003). *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. jakarta: Visimedia.

DOKUMENTASI

Gambar 1. Kantor Desa Girisa



Gambar 2. Wawancara bersama Kepala Desa Girisa



Gambar 3. Wawancara bersama sekretaris desa



Gambar 3. Wawancara bersama anggota LPM



Gambar 4. Wawancara bersama masyarakat





Gambar 5. Musyawarah dusun



Gambar 6. bakti sosial dalam gotong royong untuk membersihkan jalan dan memperbaiki mesjid





Gambar 7. Pembangunan saluran drainase dusun b tenilo



Pedoman Wawancara.

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa girisa.?
2. Apakah masyarakat memberikan usulan atau ide dalam rapat perencanaan pembangunan.?
3. Apakah dalam proses pembangunan infrastruktur masyarakat berpartisipasi dalam memberikan dana atau material.?
4. Sejauh mana masyarakat memanfaatkan dan menikmati pembangunan infrastruktur di desa girisa.?
5. Apakah Pembangunan infrastruktur yang ada di desa girisa sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.?
6. Bagaimana peran kepala desa dalam melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi.?
7. Sejauhmana tingkat kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.?

15/6/2020

lemlit.ichsan/lemlit/cetak-surat-penelitian-mahasiswa/1962/



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2072/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Girisa

di,-

Kabupaten Boalemo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Desi Sumanti Date
NIM : S2116005
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA GIRISA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO
Judul Penelitian : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GIRISA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 04 Februari 2020


Ketua,
Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN PAGUYAMAN
DESA GIRISA
Jln.Tanjung Kramat Muara Sungai Paguyaman KP.96261

Nomor : 474/Ds-Grs/K.Pag/63/II/2020
 Lampiran :
 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth,
 Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT)
 Universitas Icsan Gorontalo
 Di-
 Gorontalo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Icsan Gorontalo Nomor : 2072/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020, Tanggal 18 Februari Tahun 2020 tentang Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan Proposal/skripsi kepada :

Nama Mahasiswa : Desi Sumanti Date
 Nim : 0911108104
 Fakultas : Ilmu sosial, Ilmu Politik
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Lokasi Penelitian : **DESA GIRISA KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN BOALEMO**
 Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA GIRISA KEC. PAGUYAMAN KAB. BOALEMO**

Demikian atas penerimaannya izin Penelitian ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Girisa, 18 Februari 2020
 Mengetahui

Kepala Desa Girisa



Andrias Nonowa, SH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0256/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : DESI SUMANTI DATE
NIM : S2116005
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di desa girisa kecamatan paguyaman kabupaten boalemo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 20%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 23 Juni 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan insfrastruktur

ORIGINALITY REPORT

20%	18%	5%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	4%
2	ejournal.an.fisip-unmul.ac.id Internet Source	3%
3	www.scribd.com Internet Source	2%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	2%
5	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
7	docplayer.info Internet Source	1%
8	ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id Internet Source	1%
9	anzdoc.com Internet Source	1%

10	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
11	id.123dok.com Internet Source	1%
12	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	1%
13	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
15	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1%
16	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1%
17	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	<1%
18	prezi.com Internet Source	<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On



ENO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006	SDN 2 BILATO	Kec. Bilato	Berijazah
2	2009	SMPN 1 BILATO	Kec. Bilato	Berijazah
3	2012	SMAN 1 PAGUYAMAN	Kec. Paguyaman	Berijazah
4	2020	FISIP UNISAN GORONTALO	Kota Gorontalo	Berijazah

